

**PENGETAHUAN DAN SIKAP WARGA NEGARA MUDA TERHADAP  
KEBIJAKAN PANDEMI COVID-19**

*KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF YOUNG CITIZENS TOWARDS POLICIES  
ON THE COVID-19 PANDEMI*

**Meidi Saputra\***

Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65114, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 19 April 2022  
Disetujui : 23 Oktober 2022

**Keywords:**

knowledge, attitude, young citizen,  
policy, pandemic covid-19

**Kata Kunci:**

pengetahuan, sikap, warga negara  
muda, kebijakan, pandemi covid-19

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [meidi.saputra.fis@um.ac.id](mailto:meidi.saputra.fis@um.ac.id)

**Abstract:** this study aims to analyze the knowledge and attitudes of young citizens before and after the Covid-19 pandemic policy. This study uses a quantitative approach with a comparative survey method. The sample in this study was 376 students who were spread proportionally in East Java. Data collection was carried out using a questionnaire or questionnaire technique. The data that has been obtained is analyzed using descriptive techniques and displayed in the form of bar graphs. The results of the study show that the knowledge of young citizens is quite good, as evidenced by the reduction in the category of unfavorable from 5.1 percent before the policy was introduced to 3.4 percent after the policy was implemented. The attitude of young citizens who disagree with the Covid-19 pandemic policy has increased starting from the implementation of health protocols, prohibition of activities in public places, a sense of responsibility for the safety of the community, responses to seeing people not wearing masks, feeling guilty if they don't comply with health protocols, sanctions for violators of health protocols, transparency regarding information regarding the Covid-19 pandemic, and granting equal rights to Covid-19 services.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan serta sikap warga negara muda sebelum dan setelah adanya kebijakan pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei komparatif. Sampel dalam kajian ini berjumlah 376 mahasiswa yang tersebar secara proporsional di Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket atau kuesioner. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan warga negara muda sudah cukup baik yang dibuktikan dengan berkurangnya kategori kurang baik dari 5,1 persen sebelum ada kebijakan menjadi 3,4 persen setelah ada kebijakan. Sikap warga negara muda yang tidak setuju terhadap kebijakan pandemi Covid-19 mengalami peningkatan mulai dari pelaksanaan protokol kesehatan, larangan berkegiatan di tempat umum, rasa tanggung jawab akan keselamatan komunitas, tanggapan melihat orang tidak memakai masker, memiliki perasaan bersalah jika tidak mematuhi protokol kesehatan, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, keterbukaan terkait informasi pandemi Covid-19, serta pemberian hak yang sama terhadap pelayanan Covid-19.

## PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah menjadi ancaman global semenjak dua tahun terakhir. Upaya pengendalian penyebaran Covid-19 masih terus dilakukan tidak terkecuali di Negara Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah telah merancang berbagai strategi melalui pembentukan satuan petugas penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah. Strategi pencegahan Covid-19 yang dilakukan pemerintah meliputi kampanye atau himbuan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M), *testing, tracing*, dan *treatment* (3T), serta aturan pembatasan kegiatan masyarakat dari skala makro sampai mikro (Perbawa, 2021). Jumlah kasus penyebaran Covid-19 masih terus meningkat setiap harinya. Pemerintah harus merancang langkah yang efektif dan efisien untuk mengurangi dampak yang dikhawatirkan dari penyebaran Covid-19.

Pemerintah telah memberikan upaya preventif dalam menekan laju sebaran Covid-19 salah satunya dengan menemukan vaksin. Pemilihan vaksin dikarenakan sifatnya yang tidak hanya melindungi secara individu tetapi juga populasi masyarakat secara luas (Gurning dkk, 2021). Pemberian vaksin diharapkan dapat mengontrol penyebaran Covid-19 dan terciptanya kekebalan komunitas (Joyosemito & Nasir, 2021). Vaksin menjadi upaya efektif karena telah terbukti mampu menurunkan kasus penyebaran penyakit menular yang bekerja melalui mekanisme imunitas tubuh (Octafia, 2021). Seseorang yang telah mendapatkan vaksinasi akan menjadi kebal terhadap penyakit dan jika terpapar virus maka efek yang ditimbulkan cenderung ringan (Mortellaro & Castagnoli, 2011).

Vaksinasi dinilai menjadi upaya yang tepat untuk mencegah penularan, mengendalikan pandemi Covid-19, dan menghilangkan penyebaran virus dalam jangka panjang. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah memasuki babak baru dengan dimulainya pelaksanaan program vaksinasi. Pergantian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mulai dari *Work From Home* (WFH), *Era New Normal*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan berakhir pada program vaksinasi. Kebijakan vaksinasi merupakan salah satu program dari upaya penanggulangan Covid-19 dengan tujuan melindungi dari infeksi yang dapat mengakibatkan kesakitan hingga kematian (Larasati

& Sulistianingsih, 2021). Tujuan utama program vaksinasi yaitu untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (Rahayu & Sensusiyati, 2021). Pemerintah Indonesia merancang program vaksinasi untuk melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Program vaksinasi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dalam dua gelombang. Pelaksanaan vaksin dimulai sejak tanggal 13 Januari sampai Maret 2022 dengan target masyarakat yang masuk dalam skala prioritas (Zulfa & Yunitasari, 2021). Pemerintah menetapkan target sekitar 181,5 juta orang harus divaksin Covid-19 pada Maret 2022.

Target pemerintah pada pelaksanaan vaksinasi gelombang pertama yaitu 1,3 juta petugas kesehatan, 17,4 juta pegawai publik, dan 21,5 juta lansia harus tervaksinasi sampai bulan April 2022. Pemerintah pada pelaksanaan vaksinasi gelombang kedua menetapkan target 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lain (Sari, 2021). Tahapan pelaksanaan program vaksinasi didasarkan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin (Dewi, 2021). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia dilakukan secara bertahap agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai sasaran.

Pemerintah Indonesia berupaya menghadirkan vaksin yang aman dan efektif untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam memastikan terpenuhinya ketersediaan vaksin telah melakukan perjanjian multilateral seperti *COVAX Facility* bersama *GAVI* dan *WHO*, serta donasi yang diterima dari negara-negara sahabat. Vaksin yang telah diberikan izin oleh BPOM berjumlah 10 jenis meliputi *Sinovac*, *AstraZeneca*, *Sinopharm*, *Moderna*, *Pfizer*, *Novavax*, *Sputnik-V*, *Janssen*, *Convidencia*, dan *Zifivax*. Jenis vaksin Covid-19 yang dinyatakan aman memiliki aturan penggunaannya yaitu berdasarkan jumlah, jarak, dan *platform* vaksin (Puslitbang Kemenag, 2021). Macam-macam vaksin yang digunakan di Indonesia dipastikan telah teruji klinis dan terbukti efektif dapat menekan angka penyebaran Covid-19.

Kebijakan vaksinasi Covid-19 mendapatkan persetujuan dan penolakan dari masyarakat. Program vaksinasi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat karena takut akan efek

samping, kehalalan, tidak percaya vaksin, dan efikasi vaksin (Utami, 2021). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) ditemukan fakta bahwa hanya sebanyak 54,9 % anak muda Indonesia dari kelompok usia 22 sampai 25 tahun menolak untuk divaksinasi (Litha, 2021). Hasil survei *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) juga memberikan laporannya bahwa anak-anak muda sebanyak 63,6% di DKI Jakarta dan 55,6% DI Yogyakarta cenderung untuk menolak divaksin (Anugerah, 2021). Mayoritas hasil survei dari IPI dan CSIS menunjukkan bahwa warga negara muda menolak untuk divaksin karena merasa sehat dan masih meragukan keamanan vaksin.

Keterlibatan warga negara muda dalam vaksinasi massal sangat krusial dalam menekan penyebaran Covid-19 dan terciptanya kekebalan kelompok. Peran aktif dari seluruh warga negara muda harus ditingkatkan untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 (Rachman & Fitra, 2021). Warga negara muda sebagai agen perubahan pada masa pandemi Covid-19 harus menyukseskan pelaksanaan program vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Widayati & Mustika, 2021). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kajian ini akan membahas terkait (1) pengetahuan warga negara muda terhadap kebijakan pandemi Covid-19 dan (2) sikap warga negara muda terhadap kebijakan pandemi Covid-19.

**METODE**

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei komparatif untuk membandingkan dua kelompok responden sebelum dan setelah adanya kebijakan pandemi Covid-19. Populasi dalam kajian ini adalah mahasiswa yang tersebar secara proporsional di Jawa Timur. Sampel pada saat survei sebelum adanya kebijakan pandemi Covid-19 sejumlah 376 orang dan 321 orang setelah adanya kebijakan. Survei pertama dilakukan

mulai bulan Mei sampai Juli Tahun 2021 dan survei kedua dilakukan pada bulan April sampai Mei Tahun 2022. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket yang disebarakan dalam bentuk *google form*. Angket yang digunakan terdiri atas pertanyaan terkait pengetahuan dan sikap terhadap adanya kebijakan pandemi Covid-19 masing-masing berjumlah 8 butir. Pengetahuan responden dinyatakan baik jika dapat menjawab minimal 5 pertanyaan dengan benar dan dikatakan kurang baik jika menjawab kurang dari 5 pertanyaan dengan benar. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dengan grafik batang.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengetahuan Warga Negara Muda terhadap Kebijakan Pandemi Covid-19**

Responden yang terlibat rata-rata berumur 19 tahun untuk kedua kelompok sebelum dan setelah adanya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki pada sebelum adanya kebijakan berjumlah 151 orang dan sesudah adanya kebijakan menjadi 156. Berbanding terbalik dengan kelompok responden perempuan yang lebih banyak pada kelompok sebelum adanya kebijakan sejumlah 224 orang dan setelah diterapkan kebijakan Covid-19 menjadi 164 orang. Perbedaan jumlah responden pada saat sebelum dan setelah adanya kebijakan tidak berpengaruh terhadap pengumpulan data karena mahasiswa yang tidak terlibat memiliki karakteristik yang sama.

Pengetahuan terhadap kebijakan pandemi Covid-19 sangat penting bagi semua warga negara Indonesia. Tingkat pengetahuan masyarakat yang baik terhadap kebijakan pandemi dapat mencegah penyebaran Covid-19 (Suprayitno dkk, 2020). Kategori pengetahuan warga negara muda terhadap kebijakan Covid-19 dijelaskan pada gambar 1.



**Gambar 1.** Grafik Pengetahuan terhadap Kebijakan Covid-19

Grafik pada gambar 1 menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa pada kategori baik sebelum adanya kebijakan berjumlah 357 orang dan setelah adanya kebijakan menjadi 310 orang. Perolehan pengetahuan yang baik jika dipresentasikan diperoleh kenaikan sebesar 2% yaitu dari 94,9% menjadi 96,6%. Kelompok responden dengan pengetahuan kurang baik diperoleh angka 19 orang pada saat sebelum adanya kebijakan Covid-19 dan 11 orang setelah adanya kebijakan. Pengetahuan yang kurang baik jika dipresentasikan mengalami penurunan dari 5,1% menjadi 3,4%. Pengetahuan responden terkait kebijakan pandemi Covid-19 dalam kategori baik dan kurang baik menurun grafiknya secara angka.

Strategi dalam mencegah penyebaran Covid-19 yaitu menghambat dan menghentikan laju penyakit dengan melibatkan dukungan dari masyarakat. Penyebaran Covid-19 dapat segera dihentikan jika masyarakat khususnya generasi muda memiliki pengetahuan yang baik. Pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 cenderung baik pada masa awal pandemi (Utami, 2021). Warga negara muda yang memiliki pengetahuan baik didukung oleh penerimaan berbagai informasi. Pemberian informasi secara edukatif dan inovatif dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyebaran Covid-19 (Widayati & Mustika, 2021). Tingkat pengetahuan seseorang berperan penting dalam berperilaku untuk mencegah penyebaran Covid-19.

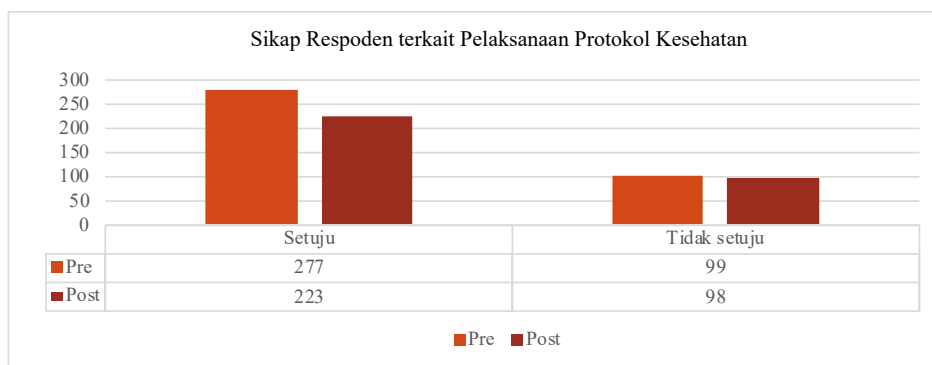
**Sikap Warga Negara Muda terhadap Kebijakan Pandemi Covid-19**

Masyarakat yang memiliki pengetahuan baik tentang Covid-19 akan berpengaruh kepada sikapnya dalam mematuhi kebijakan. Pengetahuan seseorang terkait bahaya dan resiko penularan Covid-19 di masyarakat jika dalam kategori baik, maka akan lebih waspada

dalam melakukan kegiatannya (Utami, Mose, & Martini, 2020). Perilaku warga negara untuk mematuhi protokol kesehatan sangat berkaitan dengan pengetahuannya terhadap kebijakan pandemi Covid-19 (Mujani & Irvani, 2020). Pengetahuan warga negara khususnya generasi muda di Indonesia belum tentu sejalan dengan sikapnya terhadap adanya kebijakan selama pandemi Covid-19. Sikap mahasiswa dalam mematuhi protokol kesehatan dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa mahasiswa setuju terkait pelaksanaan protokol kesehatan sebelum adanya kebijakan pandemi Covid-19 sejumlah 277 orang dan mengalami penurunan menjadi 223 orang setelah adanya kebijakan. Penurunan terjadi pada kelompok responden yang tidak setuju dengan selisih 1 orang sehingga tidak memberikan dampak signifikan. Hasil survei menunjukkan bahwa 73,6% protokol kesehatan pada masa sebelum kebijakan pandemi Covid-19 gencar dilaksanakan dan menurun menjadi 69,5% setelah adanya kebijakan 3M di masyarakat. Penurunan sikap masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan dapat meningkatkan kasus Covid-19 (Siregar, 2021). Sikap warga negara muda terhadap kebijakan pandemi Covid-19 harus ditingkatkan untuk memotivasi masyarakat umum dalam mematumhinya.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 salah satunya adalah protokol kesehatan dengan slogan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M). Kebijakan 3M mengharuskan warga negara untuk ikut andil dan berpartisipasi mematumhinya. Perilaku masyarakat yang setuju untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan adanya kebijakan 3M sebesar 70% dan 30% belum setuju (Mujani & Irvani, 2020). Masyarakat



**Gambar 2.** Grafik Sikap Responen terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan

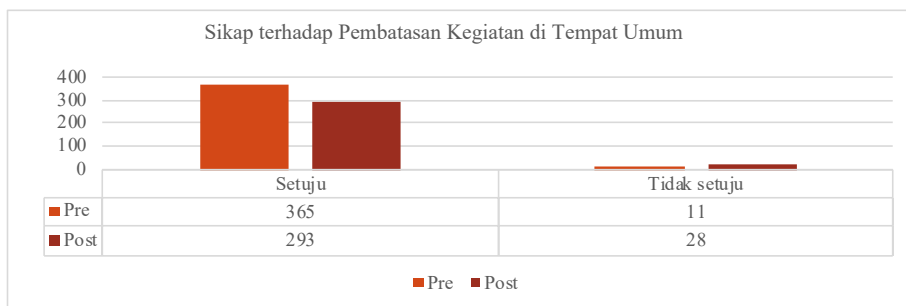
yang belum setuju dengan kebijakan pandemi Covid-19 jumlahnya cukup banyak. Penyebaran virus Covid-19 menjadi tidak terkendali dan dapat meningkatkan angka kasus positif di Indonesia jika masyarakat banyak yang belum menyetujui kebijakan terkait pandemi.

Pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 juga memberlakukan *social distancing* di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 (Joyosemito & Nasir, 2021). Kegiatan di berbagai sektor yang dilakukan baik oleh instansi pemerintah dan swasta diharuskan untuk dibatasi. Kebijakan PSBB pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan menjadi pilihan pemerintah dalam rangka memutus penyebaran penyakit dan mengurangi resiko bertambahnya pasien meninggal dunia (Perbawa, 2021). Masyarakat di seluruh Indonesia harus mematuhi dan mendukung kebijakan PSBB agar terhindar dari penularan Covid-19.

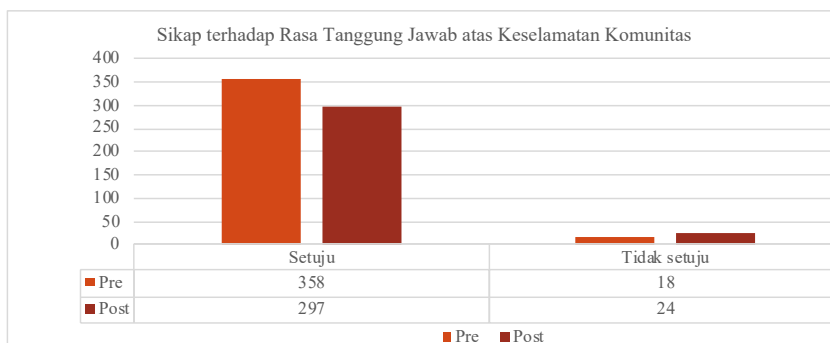
Perilaku masyarakat terhadap kebijakan pandemi Covid-19 khususnya PSBB mendapatkan penolakan beberapa kelompok masyarakat. PSBB selain memberikan dampak positif terhadap pencegahan penyebaran Covid-19 juga berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat (Rachman & Fitra, 2020). Sikap mahasiswa terhadap pembatasan kegiatan di tempat umum dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan bahwa mahasiswa yang setuju dengan adanya pembatasan kegiatan di tempat umum sebelum adanya kebijakan sejumlah 365 orang dan 293 orang setelah adanya kebijakan. Responden yang semula 11 orang tidak setuju dengan adanya pembatasan kegiatan di tempat umum meningkat menjadi 28 orang. Sikap warga negara muda sebelum adanya kebijakan pandemi Covid-19 setidaknya 97,1% setuju dan menurun menjadi 91,3% setelah adanya kebijakan pembatasan kegiatan di tempat umum. Warga negara muda seharusnya menyadari pentingnya kebijakan *social distancing* untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kebijakan PSBB di masyarakat diharapkan dapat menekan angka kenaikan kasus Covid-19. Sikap kepedulian sosial pada masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh generasi muda (Puslitbang Kemenag, 2021). Keselamatan komunitas atau masyarakat pada masa pandemi Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama. Kesadaran warga negara cenderung menjaga keselamatan keluarganya saja (Afandi, Handayani, & Zaini, 2020) and moderate knowledge as many as 17 respondents (13.4 %). Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 membutuhkan kepedulian warga negara yang tinggi baik kepada sesama dan lingkungan sekitar. Hasil survei terhadap sikap rasa tanggung jawab atas keselamatan komunitas dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 3. Grafik Sikap Sikap terhadap Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum



Gambar 4. Grafik Sikap terhadap Rasa Tanggung Jawab atas Keselamatan Komunitas

Gambar 4 menunjukkan bahwa mahasiswa sebelum adanya kebijakan banyak yang setuju memiliki sikap tanggung jawab akan keselamatan komunitas atau masyarakat di wilayah tempat tinggalnya sejumlah 358 orang dan mengalami penurunan setelah adanya kebijakan pemerintah menjadi 297 orang. Sikap mahasiswa yang tidak setuju akan tanggung jawab atas keselamatan masyarakat disekitarnya mengalami peningkatan dari 18 orang sebelum ada kebijakan dan menjadi 24 orang setelah adanya kebijakan. Rasa tanggung jawab warga negara muda atas keselamatan komunitas di sekitarnya mengalami penurunan setelah adanya kebijakan Covid-19.

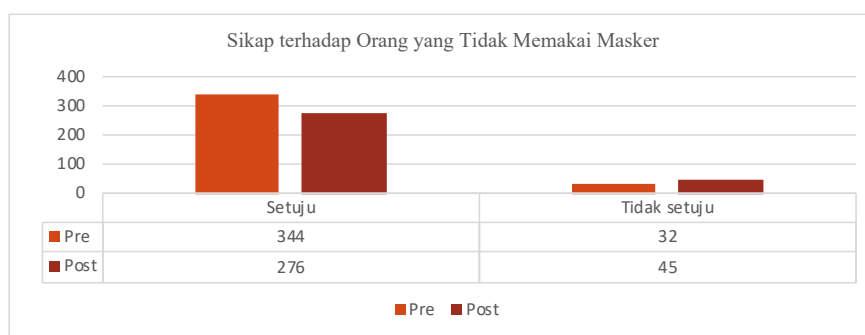
Kebijakan penggunaan masker telah disosialisasikan sejak awal pandemi mulai dari penerapan protokol kesehatan 3M hingga 5M. Unsur utama yang selalu ada untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah menggunakan masker. Hasil survei sikap mahasiswa terhadap orang yang tidak menggunakan masker dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5 menunjukkan bahwa sikap mahasiswa yang setuju terhadap penggunaan masker saat berinteraksi sejumlah 344 orang sebelum adanya kebijakan dan terjadi penurunan pada saat ada kebijakan pandemi Covid-19 sebanyak 276 orang. Responden yang tidak setuju mengalami peningkatan dari 32 responden sebelum diterapkan kebijakan menjadi 45 responden setelah ada kebijakan.

Mayoritas masyarakat sebanyak 85,9% sampai 91,5% memiliki sikap setuju atau patuh dengan adanya protokol kesehatan menggunakan masker pada setiap kegiatan (Purnamayanti & Astiti, 2020). Sikap kepatuhan penggunaan masker untuk kegiatan sehari-hari harus dimiliki oleh setiap warga negara muda untuk menjaga kesehatannya dari penyebaran Covid-19.

Kebijakan penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk menurunkan angka sebaran kasus Covid-19. Penerapan protokol kesehatan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat (Suprayitno dkk, 2020). Sikap warga negara muda yang bersalah jika tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dapat dilihat pada gambar 6

Gambar 6 menunjukkan bahwa mahasiswa yang setuju memiliki rasa bersalah jika tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik sebesar 360 orang sebelum adanya kebijakan dan mengalami penurunan menjadi 301 orang setelah adanya kebijakan. Kelompok responden yang tidak setuju cenderung mengalami kenaikan dari 16 orang menjadi 20 orang. Mahasiswa yang setuju bahwa penerapan protokol kesehatan harus sesuai dengan kebijakan mencapai sekitar 93,7% sampai 95,7%. Warga negara muda cenderung tidak mematuhi protokol kesehatan setelah adanya kebijakan terkait Covid-19. Sikap positif warga negara muda terkait penerapan protokol kesehatan dapat menurunkan penyebaran Covid-19 pada semua kelompok umur.



Gambar 5. Grafik Sikap terhadap Orang yang Tidak Memakai Masker



Gambar 6. Grafik Sikap terhadap Penerapan Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan sering kali dihiraukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan bahayanya penularan Covid-19. Protokol kesehatan merupakan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak selama masa pandemi Covid-19 (Siregar, 2021). Hasil survei terkait kesediaan warga negara muda dalam menerima sanksi jika melanggar protokol kesehatan dapat dilihat pada gambar 7.

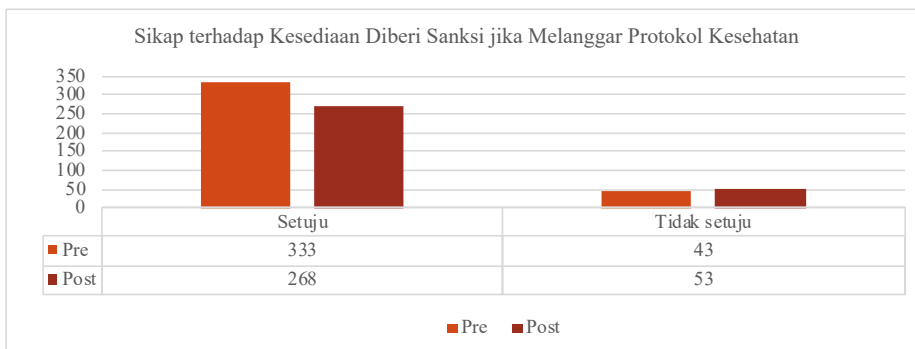
Gambar 7 menunjukkan bahwa sikap responden yang setuju terhadap adanya pemberian sanksi jika melanggar protokol kesehatan sebelum adanya kebijakan sebesar 333 orang dan menurun pada saat setelah ada kebijakan menjadi 268 orang. Kelompok yang tidak setuju adanya pemberian sanksi melanggar protokol kesehatan mengalami kenaikan sebelum dan sesudah adanya kebijakan terkait Covid-19 yaitu dari 43 orang menjadi 53 orang.

Responden yang setuju terhadap pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan baik sengaja dan tidak mencapai 88,5%. Pelanggaran terhadap protokol kesehatan harus diberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera kepada seseorang agar tidak mengulangi kesalahannya.

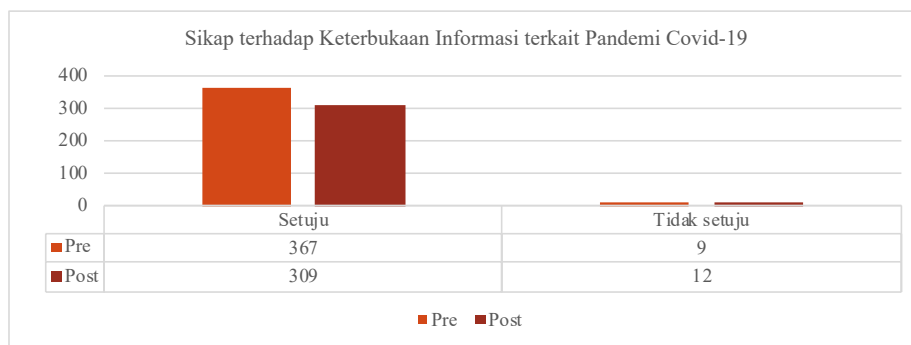
Kelonggaran terkait pemberian sanksi memberikan peluang bagi masyarakat untuk

mengabaikan ketaatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dampak dari kelalaian masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan yaitu meningkatnya kasus Covid-19 di kemudian hari (Zuleha, 2021). Pemberian sanksi pada seseorang yang melanggar protokol kesehatan dapat diberikan secara bertahap mulai dari hukuman ringan hingga berat. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan telah ada dalam peraturan perundangan-undangan dari tingkat nasional sampai kabupaten (Perbawa, 2021). Kebijakan mengenai penerapan berbagai sanksi sangat efektif agar masyarakat tidak menghiraukan penerapan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kebijakan pandemi Covid-19 yang mendapatkan pro dan kontra dari sekelompok masyarakat tidak menurunkan motivasi sebagian orang untuk tetap bersikap suportif. Masyarakat harus mampu mencerna dengan baik informasi yang diterima pada masa pandemi Covid-19 (Rachman & Pramana, 2020). Hal ini dilakukan untuk menghindari berita-berita *hoax* atau salah yang dapat merugikan semua pihak (Rahayu & Sensusiyati, 2021). Hasil survei terkait sikap keterbukaan warga negara muda dalam menerima informasi pada masa pandemi Covid-19 dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Grafik Sikap terhadap Keterbukaan Informasi Pandemi Covid-19



Gambar 7. Grafik Sikap terhadap Kesediaan Diberi Sanksi Melanggar Protokol Kesehatan

Gambar 8 menunjukkan bahwa mahasiswa yang setuju memiliki sikap keterbukaan untuk memberikan informasi terkait pandemi Covid-19 sebanyak 367 orang dan menurun setelah adanya kebijakan Covid-19 menjadi 309 orang. Kelompok yang tidak setuju dengan adanya keterbukaan informasi terkait Covid-19 mengalami kenaikan dari 9 orang sebelum adanya kebijakan menjadi 12 orang setelah adanya kebijakan.

Pemberitaan secara luas terkait angka kasus Covid-19 pada awal pandemi masih jarang dilakukan. Informasi di media massa semakin meluas seiring dengan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Kecenderungan untuk menutupi pemberitaan tentang Covid-19 juga dilakukan karena jumlah pasien meninggal dunia setiap harinya bertambah. Keterbukaan dari pemerintah untuk menyampaikan berita bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan informasi yang dapat merugikan berbagai pihak selama masa pandemi Covid-19 (Rengga, 2021). Informasi seputar Covid-19 harus dapat disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Sikap warga negara muda terhadap berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu mendukungnya. Peran aktif dari seluruh masyarakat khususnya generasi muda dalam pelaksanaan kebijakan dapat menurunkan angka penyebaran Covid-19 (Zulfa & Yunitasari, 2021). Hasil survei sikap warga negara muda terkait perolehan hak pelayanan yang sama dapat dilihat pada gambar 9.

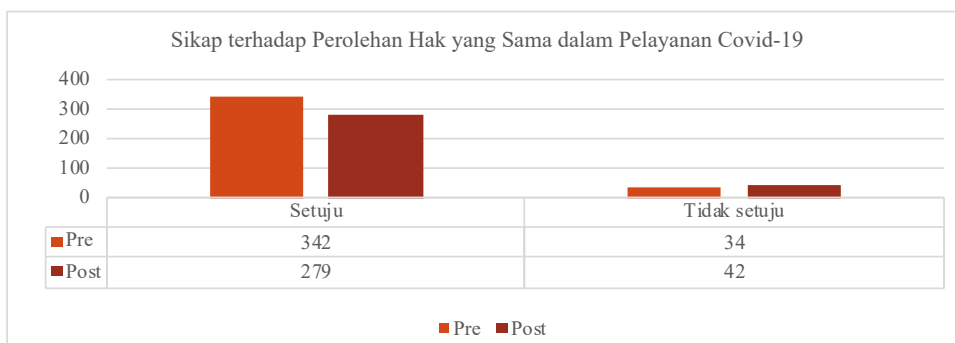
Gambar 9 menunjukkan bahwa mahasiswa yang setuju terkait perolehan hak yang sama dalam pelayanan Covid-19 sebanyak 342 sebelum adanya kebijakan dan menurun setelah adanya kebijakan menjadi 279 orang. Kelompok yang tidak setuju terkait perolehan hak pelayanan yang sama meningkat sebanyak 34 orang sebelum ada kebijakan dan setelah ada kebijakan menjadi 42 orang. Responden menilai bahwa setiap orang

belum mendapatkan pelayanan Covid-19 yang sama. Warga negara muda setuju jika setiap orang yang terinfeksi Covid-19 mendapatkan pelayanan sama.

Pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik, serta terpenuhinya pelayanan kesehatan. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19 tanpa melihat status sosial seseorang (Sukur dkk, 2020). Keselamatan tenaga kesehatan juga harus diperhatikan selama menangani masalah Covid-19 di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Kondisi pandemi Covid-19 menuntut setiap warga negara khususnya di Indonesia untuk adaptif terhadap berbagai macam kebijakan.

**SIMPULAN**

Pengetahuan warga negara muda terhadap kebijakan pandemi Covid-19 sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya responden dengan kategori kurang baik pengetahuannya dari 5,1% sebelum ada kebijakan menjadi 3,4% setelah ada kebijakan. Sikap warga negara muda yang tidak setuju terhadap kebijakan pandemi Covid-19 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada respon mahasiswa terkait pada tujuh pertanyaan sikap meliputi pelaksanaan protokol kesehatan, larangan berkegiatan di tempat umum, rasa tanggung jawab akan keselamatan komunitas, tanggapan melihat orang tidak memakai masker, memiliki perasaan bersalah jika tidak mematuhi protokol kesehatan, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, keterbukaan



**Gambar 9.** Grafik Sikap terhadap Hak yang Sama dalam Pelayanan Covid-19

terkait informasi pandemi Covid-19, serta pemberian hak yang sama terhadap pelayanan Covid-19. Pengetahuan warga negara muda di Indonesia tidak sesuai dengan sikapnya terhadap kebijakan pandemi Covid-19.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anugerah, P. (23 Februari 2021). Covid-19: Dua Survei Menyebut Banyak Anak Muda Menolak Vaksin, Bagaimana Meyakinkan Mereka? *BBC News Indonesia*, hlm. 1-3.
- Afandi, A., Handayani, L. T., & Zaini, M. (2020). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri di Masa Pandemi Covid-19 di RSD Balung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 19(1), 1-9.
- Dewi, R. K. (9 Januari 2021). 4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 dan Jadwal Pelaksanaannya. *Kompas*, hlm.1.
- Gurning, F. P., Siagian, L. K., Wiranti, I., Devi, S., & Atika, W. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 43-50.
- Joyosemito, I. S., & Nasir, N. M. (2021). Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemi Covid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 55-66.
- Larasati, P. A., & Sulistianingsih, D. (2021). Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 99-111.
- Litha, Y. (19 Juli 2021). Survei LSI: 55 Persen yang Tolak Vaksin Khawatirkan Efek Samping. *VOA Indonesia*, hlm. 1.
- Mortellaro, A., & Castagnoli, P. R. (2011). From Vaccine Practice to Vaccine Science: The Contribution of Human Immunology to The Prevention of Infectious Disease. *Immunology and Cell Biology*, 89(3), 332-339.
- Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 219-238.
- Octafia, L. A. (2021). Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi, dan Pilihan. *Emik*, 4(2), 160-174.
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 197-205.
- Purnamayanti, N. M. D., & Astiti, N. K. E. (2020). Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan Penggunaan Masker oleh Ibu Hamil pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 9(1), 28-37.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama. (2021). *Survei Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Umat Beragama terkait COVID-19: Vaksin dan Vaksinasi*. Jakarta: Tim Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020). Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289-303.
- Rachman, F. F., & Pramana, S. (2020). Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin Covid-19 pada Media Sosial Twitter. *Health Information Management Journal*, 8(2), 100-109.
- Rahayu, R. N., & Sensusiyati. (2021). Vaksin Covid 19 di Indonesia: Analisis Berita Hoax. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora Vaksin*, 2(7), 39-49.
- Rengga. (2021). *Esensi Peran Keterbukaan Informasi Hadapi Banyaknya Dimensi Selama Pandemi*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Sari, H. P. (25 Agustus 2021). Survei Indikator: 76,4 Persen Responden Tolak Beli Vaksin Covid-19 dari Pemerintah. *Kompas*, hlm. 1.
- Siregar, R. A. (2021). *Perilaku Masyarakat dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Johor*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sukur, M. H., Kurniadi, B., Haris, & Faradillahsari, R. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Inicio Legis*, 1(1), 1-17.
- Suprayitno, E., Rahmawati, S., Ragayasa, A., & Pratama, M. Y. (2020). Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19. *Journal of Health Science*, 5(2), 68-73.
- Utami, R. A., Mose, R. E., & Martini, M. (2020).

- Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Kesehatan Holistic*, 4(2), 68-77.
- Utami, S. (25 Agustus 2021). Survei Terbaru Ungkap Mayoritas Orang Indonesia Tolak Vaksin Covid-19. *Media Indonesia*, hlm. 1.
- Widayati, L. P., & Mustika, I. (2021). Sikap Remaja terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Orang Tanpa Gejala (OTG) di Surabaya. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(2), 39-44.
- Zuleha. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Kota Langsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 98-111.
- Zulfa, I. M., & Yunitasari, F. D. (2021). Edukasi Generasi Muda Siap Vaksinasi Covid-19. *Asta*, 1(2), 100-112.